



BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN

KEPUTUSAN
KEPALA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
NOMOR KP.01/KEP- 355 /K.SU/04/2022
TENTANG
PEMUTAKHIRAN TIM PERTIMBANGAN LAYANAN INFORMASI DAN
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN
PEMBANGUNAN

KEPALA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN,

Menimbang: Bahwa dengan telah disetarakannya Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional sesuai KEP-656/K/SU/2020 tentang Pengangkatan melalui Penyetaraan Jabatan Administrasi Ke Dalam Jabatan Fungsional, perlu memutakhirkan Keputusan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan tentang Pembentukan Tim Pertimbangan Layanan Informasi dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Lingkungan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;

Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
4. Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Standar Layanan Informasi Publik;
5. Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 9 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
6. Keputusan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor KEP-310/K/SU/2021 Tentang Satuan Tugas Pengelolaan Reputasi Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan
PERTAMA : Memutakhirkan Tim Pertimbangan Layanan Informasi dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Mencabut Keputusan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor KEP-456/K/SU/2019 tentang Tim Pembentukan Layanan Informasi dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 31 Agustus 2022

KEPALA BADAN PENGAWASAN
KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
REPUBLIK INDONESIA,



MUHAMMAD YUSUF ATEH

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KEPALA BPKP
 NOMOR KP.01/KEP- 355 /K.SU/04/2022
 TENTANG PEMUTAKHIRAN TIM
 PERTIMBANGAN LAYANAN INFORMASI
 DAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI
 DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN
 BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN
 PEMBANGUNAN

**SUSUNAN TIM PERTIMBANGAN LAYANAN INFORMASI DAN PEJABAT
 PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
 DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN**

A. TIM PERTIMBANGAN LAYANAN INFORMASI

1	Sekretaris Utama
2	Deputi Kepala BPKP Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah Bidang Perekonomian dan Kemaritiman
3	Deputi Kepala BPKP Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah Bidang Politik, Hukum, Keamanan, Pembangunan Manusia, dan Kebudayaan
4	Deputi Kepala BPKP Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah
5	Deputi Kepala BPKP Bidang Akuntan Negara
6	Deputi Kepala BPKP Bidang Investigasi

B. PPID BPKP DAN UNSUR PENDUKUNG PELAKSANAAN TUGAS PPID

1	PPID BPKP	Kepala Biro Hukum dan Komunikasi
2	PPID Bidang Pengelola Informasi	Kepala Pusat Informasi Pengawasan
3	PPID Bidang Dokumentasi dan Arsip	Kepala Biro Umum dan PBJ

C. PPID UNIT KERJA PUSAT DAN PERWAKILAN

1	PPID pada Direktorat Pengawasan Bidang Ekonomi dan Keuangan	Direktur Pengawasan Bidang Ekonomi dan Keuangan
2	PPID pada Direktorat Pengawasan Bidang Pangan, Energi, dan SDA	Direktur Pengawasan Bidang Pangan, Energi dan SDA
3	PPID pada Direktorat Pengawasan Bidang Infrastruktur, Tata Ruang, dan Perhubungan	Direktur Pengawasan Bidang Infrastruktur, Tata Ruang dan Perhubungan
4	PPID pada Direktorat Pengawasan Bidang Ekonomi Kreatif, Perdagangan, dan Ketenagakerjaan	Direktur Pengawasan Bidang Ekonomi Kreatif, Perdagangan dan Ketenagakerjaan
5	PPID pada Direktorat Pengawasan Bidang Kerjasama Investasi dan Pembiayaan Pembangunan	Direktur Pengawasan Bidang Kerjasama Investasi dan Pembiayaan Pembangunan

6	PPID pada Direktorat Pengawasan Bidang Pertahanan dan Keamanan	Direktur Pengawasan Bidang Pertahanan dan Keamanan
7	PPID pada Direktorat Pengawasan Bidang Politik dan Penegakan Hukum	Direktur Pengawasan Bidang Politik dan Penegakan Hukum
8	PPID pada Direktorat Pengawasan Bidang Sosial dan Penanganan Bencana	Direktur Pengawasan Bidang Sosial dan Penanganan Bencana
9	PPID pada Direktorat Pengawasan Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Kebudayaan	Direktur Pengawasan Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Kebudayaan
10	PPID pada Direktorat Pengawasan Bidang Pengembangan Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Reformasi Birokrasi	Direktur Pengawasan Bidang Pengembangan Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Reformasi Birokrasi
11	PPID pada Direktorat Pengawasan Akuntabilitas Keuangan Daerah	Direktur Pengawasan Akuntabilitas Keuangan Daerah
12	PPID pada Direktorat Pengawasan Akuntabilitas Program Lintas Sektoral Pembangunan Daerah	Direktur Pengawasan Akuntabilitas Program Lintas Sektoral Pembangunan Daerah
13	PPID pada Direktorat Pengawasan Akuntabilitas Keuangan, Pembangunan, dan Tata Kelola Pemerintahan Desa	Direktur Pengawasan Akuntabilitas Keuangan, Pembangunan, dan Tata Kelola Pemerintahan Desa
14	PPID pada Direktorat Pengawasan Tata Kelola Pemerintah Daerah	Direktur Pengawasan Tata Kelola Pemerintah Daerah
15	PPID pada Direktorat Pengawasan Badan Usaha Agrobisnis, Infrastruktur, dan Perdagangan	Direktur Pengawasan Badan Usaha Agrobisnis, Infrastruktur, dan Perdagangan
16	PPID pada Direktorat Pengawasan Badan Usaha Konektivitas, Pariwisata, Kawasan Industri, dan Perumahan	Direktur Pengawasan Badan Usaha Konektivitas, Pariwisata, Kawasan Industri, dan Perumahan
17	PPID pada Direktorat Pengawasan Badan Usaha Jasa Keuangan, Jasa Penilai, dan Manufaktur	Direktur Pengawasan Badan Usaha Jasa Keuangan, Jasa Penilai, dan Manufaktur
18	PPID pada Direktorat Pengawasan Badan Usaha Energi dan Pertambangan	Direktur Pengawasan Badan Usaha Energi dan Pertambangan

19	PPID pada Direktorat Pengawasan Badan Layanan Umum, Badan Layanan Umum Daerah, Badan Usaha Jasa Air, BUMD, dan BUMDes	Direktur Pengawasan Badan Layanan Umum, Badan Layanan Umum Daerah, Badan Usaha Jasa Air, BUMD, dan BUMDes
20	PPID pada Direktorat Investigasi I	Direktur Investigasi I
21	PPID pada Direktorat Investigasi II	Direktur Investigasi II
22	PPID pada Direktorat Investigasi III	Direktur Investigasi III
23	PPID pada Direktorat Investigasi IV	Direktur Investigasi IV
24	PPID pada Biro Manajemen Kinerja, Organisasi, dan Tata Laksana	Kepala Biro Manajemen Kinerja, Organisasi, dan Tata Laksana
25	PPID pada Biro Sumber Daya Manusia	Kepala Biro Sumber Daya Manusia
26	PPID pada Biro Keuangan	Kepala Biro Keuangan
27	PPID pada Biro Hukum dan Komunikasi	Kepala Biro Hukum dan Komunikasi
28	PPID pada Biro Umum dan PBJ	Kepala Biro Umum dan PBJ
29	PPID pada Inspektorat	Inspektur
30	PPID pada Pusdiklatwas	Kepala Pusdiklatwas
31	PPID pada Puslitbangwas	Kepala Puslitbangwas
32	PPID pada Pusinfowas	Kepala Pusinfowas
33	PPID pada Pusbin JFA	Kepala Pusbin JFA
34	PPID pada Perwakilan BPKP Aceh	Kepala Perwakilan BPKP Aceh
35	PPID pada Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Utara	Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Utara
36	PPID pada Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Barat	Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Barat
37	PPID pada Perwakilan BPKP Provinsi Riau	Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Riau
38	PPID pada Perwakilan BPKP Provinsi Jambi	Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Jambi
39	PPID pada Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Selatan	Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Selatan
40	PPID pada Perwakilan BPKP Provinsi Bengkulu	Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Bengkulu
41	PPID pada Perwakilan BPKP Provinsi Lampung	Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Lampung

42	PPID pada Perwakilan BPKP Provinsi DKI Jakarta	Kepala Perwakilan BPKP Provinsi DKI Jakarta
43	PPID pada Perwakilan BPKP Provinsi Banten	Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Banten
44	PPID pada Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Barat	Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Barat
45	PPID pada Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Tengah	Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Tengah
46	PPID pada Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur	Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur
47	PPID pada Perwakilan BPKP DI Yogyakarta	Kepala Perwakilan BPKP DI Yogyakarta
48	PPID pada Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Barat	Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Barat
49	PPID pada Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Timur	Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Timur
50	PPID pada Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan	Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan
51	PPID pada Perwakilan BPKP Provinsi Bali	Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Bali
52	PPID pada Perwakilan BPKP Provinsi Nusa Tenggara Timur	Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Nusa Tenggara Timur
53	PPID pada Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan	Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan
54	PPID pada Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Tengah	Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Tengah
55	PPID pada Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Utara	Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Utara
56	PPID pada Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Tenggara	Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Tenggara
57	PPID pada Perwakilan BPKP Provinsi Maluku	Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Maluku
58	PPID pada Perwakilan BPKP Provinsi Papua	Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Papua
59	PPID pada Perwakilan BPKP Provinsi Kepulauan Riau	Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Kepulauan Riau
60	PPID pada Perwakilan BPKP Provinsi Bangka Belitung	Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Bangka Belitung
61	PPID pada Perwakilan BPKP Provinsi Nusa Tenggara Barat	Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Nusa Tenggara Barat
62	PPID pada Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Tengah	Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Tengah

63	PPID pada Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Barat	Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Barat
64	PPID pada Perwakilan BPKP Provinsi Gorontalo	Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Gorontalo
65	PPID pada Perwakilan BPKP Provinsi Maluku Utara	Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Maluku Utara
66	PPID pada Perwakilan BPKP Provinsi Papua Barat	Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Papua Barat
67	PPID pada Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Utara	Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Utara

KEPALA BADAN PENGAWASAN
KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
REPUBLIK INDONESIA,



Muhammad Yusuf Ateh

MUHAMMAD YUSUF ATEH